

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2014). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Amrullah. (2014). Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia. *Ilmiah Peuradeun*, 2, 87–103.
- Averroes, A.-K. D. (n.d.). Saksi Testimonium De Auditu (hearsay). Retrieved from <http://www.negarahukum.com/hukum/saksi-testimonium-de-audituhersay.html>
- Azwar, S. (2012). *Metode penelitian hukum*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Debri, W. S., & Pradikta, H. B. (2015). Tinjauan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang tidak disumpah karena keterbelakangan mental dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual, 27, 2051–2067.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana* (Edisi kedu). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Y. (1993). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, Y. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti. (n.d.). Retrieved November 30, 2016, from <http://indekshukum.org/annotation/detail/9592e76c-7c27-1c27-fab9-303235323030.html>,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kurnia, T. S. (2016). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Margono, P. (2017). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi serta Hak-hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Independent*, 5, 44–59.

MS, H. N. (2013). Kekuatan Keterangan Saksi Anak dibawah umur dalam Pembuktian Perkara Pidana.

Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHP. *Yuridika*, 32.

Nurhaini, B. E. (2016). *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*. Bandung: Nuansa Aulia.

Panggabean, H. (2014). *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia* (2nd ed.). Bandung: P.T Alumni.

Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Prinst, D. (1998). *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan.

Sihaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Gra Sindo.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soetarna, H. (2017). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T Alumni.

Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suisino. (2014). Keterangan Saksi Via Teleconverence Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia. *Independent*, 2, 90–100.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209